

Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan Dalam Penyaluran Bibit Kelapa Sawit di Kabupaten Pelalawan

Rita Safrianti Gaho¹ Khairul Amri²

Program Studi Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2}

Email: rita.safrianti2687@student.unri.ac.id¹ khairul.amri@lecturer.unri.ac.id²

Abstrak

Penyaluran bibit kelapa sawit oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan dilaksanakan melalui tiga pola: gratis, subsidi, dan komersial. Namun dalam proses pelaksanaannya terdapat sejumlah permasalahan, seperti realisasi penyaluran yang belum mencapai target, penyaluran yang efektif hanya melalui pola subsidi, serta rendahnya daya beli masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pelaksanaan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat program penyaluran bibit kelapa sawit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Teori kinerja organisasi dari Sinambela diterapkan dengan menggunakan indikator kinerja yang meliputi produktivitas, responsivitas, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyaluran bibit kelapa sawit belum optimal berdasarkan indikator-indikator tersebut. Terdapat beberapa faktor penghambat antara lain pengelolaan sumber daya manusia, kondisi bibit yang tidak sesuai dengan spesifikasi, dan verifikasi lahan yang dilakukan oleh masyarakat.

Kata Kunci: Penyaluran, Bibit Kelapa Sawit, Kinerja, Pelaksanaan

Abstract

The distribution of oil palm seedlings by the Plantation and Livestock Service of Pelalawan Regency is carried out through three patterns: free, subsidized, and commercial. However, in the implementation process, there are several issues, such as the distribution realization not meeting the target, effective distribution only through the subsidy pattern, and the low purchasing power of the community. This research aims to analyze the implementation performance and identify the factors that hinder the palm oil seedling distribution program. The method used in this research is qualitative with a descriptive approach. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, literature study, and documentation. The organizational performance theory from Sinambela is applied using performance indicators that include productivity, responsiveness, responsibility, and accountability. The research results indicate that the implementation of palm oil seed distribution has not been optimal based on those indicators. There are several inhibiting factors, including human resource management, the condition of the seedlings not meeting specifications, and land verification conducted by the community.

Keywords: Distribution, Oil Palm Seedlings, Performance, Implementation



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pengembangan lahan perkebunan merupakan salah satu elemen kunci dalam mendorong kemajuan ekonomi, khususnya di daerah-daerah yang bergantung pada sektor perkebunan. Meskipun peningkatan hasil produksi menjadi salah satu tujuan utama, namun tujuan yang lebih fundamental dari pengembangan lahan perkebunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para pekebun. Hal ini mencakup bukan hanya peningkatan pendapatan, tetapi juga perbaikan kualitas hidup melalui akses terhadap teknologi perkebunan yang lebih baik, penyuluhan, serta fasilitas yang mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi mereka. Keberhasilan dalam pengelolaan lahan perkebunan yang berorientasi pada kesejahteraan

pekebun juga akan berkontribusi pada tercapainya tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan merata. Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu daerah di Provinsi Riau yang memiliki potensi yang cukup besar dalam sektor perkebunan. Salah satu sektor perkebunan yang dimiliki oleh Kabupaten Pelalawan yaitu kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan memberikan kontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, perkebunan kelapa sawit juga menjadi salah satu sumber penghasilan utama bagi sebagian besar masyarakat.

Setiap kecamatan memiliki kontribusi terhadap pengembangan sektor perkebunan kelapa sawit. Keberadaan perkebunan ini mencerminkan betapa strategisnya sektor kelapa sawit dalam perekonomian daerah, karena hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Pelalawan terlibat dalam pengelolaan dan produksi kelapa sawit. Distribusi yang merata ini tidak hanya meningkatkan produksi kelapa sawit, tetapi juga mendukung pemerataan ekonomi di tingkat lokal. Dengan tersebarnya lahan kelapa sawit di berbagai kecamatan, sektor ini mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di seluruh pelosok Kabupaten Pelalawan, baik di sektor pertanian, industri pengolahan, maupun layanan pendukung lainnya. Namun, kondisi perkebunan kelapa sawit saat ini sangat rendah produktivitasnya dikarenakan beberapa permasalahan yang ditemukan yaitu faktor lingkungan yang tidak sesuai, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang teknik pemeliharaan kelapa sawit yang baik serta penggunaan bibit kelapa sawit yang asal-asalan dan tidak bermutu. Penggunaan bibit kelapa sawit yang tidak bermutu disebabkan oleh harga bibit unggul yang relatif mahal sehingga banyak masyarakat/pekebun sawit yang tidak mampu membeli, ketidaktahuan masyarakat dalam membedakan antara bibit kelapa sawit yang unggul dan yang tidak serta ditemukannya oknum-oknum penjual bibit kelapa sawit palsu.

Untuk meningkatkan kembali produktivitas perkebunan kelapa sawit, pemerintah Kabupaten Pelalawan telah merencanakan berbagai program strategis salah satunya adalah penyaluran bibit kelapa sawit unggul dan bersertifikat. Melalui program ini, pemerintah memberikan akses kepada masyarakat, terutama para pekebun, untuk memperoleh bibit kelapa sawit yang berkualitas tinggi dan telah terjamin keunggulannya. Bibit unggul ini diharapkan dapat menghasilkan tanaman yang lebih produktif, tahan terhadap hama dan penyakit, serta memiliki daya saing yang lebih baik di pasar. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan sektor perkebunan kelapa sawit dengan mengedepankan penggunaan bibit yang telah terverifikasi dan bersertifikat, sehingga menjamin kualitas dan mutu hasil perkebunan. Dengan adanya program penyaluran bibit kelapa sawit unggul, diharapkan para pekebun, baik yang tergabung dalam kelompok tani maupun pekebun mandiri, dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen mereka, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kabupaten Pelalawan. Penyaluran bibit kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan diatur secara resmi dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pelalawan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penyaluran Bibit Kelapa Sawit di Kabupaten Pelalawan. Peraturan ini dibuat sebagai landasan hukum yang kuat untuk memastikan bahwa program penyaluran bibit kelapa sawit dapat dilaksanakan dengan baik, transparan, dan terorganisir. Dalam peraturan ini juga diatur bahwa yang menjadi pelaksana program ini yaitu Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan.

Ada beberapa jenis varietas bibit kelapa sawit yang ada di Dinas Perkebunan dan Peternakan dengan jumlah total bibit yaitu sebanyak 255.300 bibit. Disbunnak memberikan tanggung jawab kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembibitan dalam hal pemeliharaan bibit kelapa sawit yang profesional. UPTD Pembibitan bersama dengan Bidang Perkebunan bertanggung jawab penuh untuk memelihara bibit kelapa sawit tersebut hingga

usia bibit mencapai 9 bulan dengan pemeliharaan yang intensif, pemantauan pertumbuhan bibit, dan pemberian nutrisi yang cukup seperti air dan pupuk. Pembibitan bibit kelapa sawit dilakukan di dua lokasi yaitu di Belakang Kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan dan di Desa Sorek II, Kecamatan Pangkalan Kuras. Setelah bibit mencapai usia yang siap tanam, Disbunnak melanjutkan proses penyaluran kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya mendukung pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan. Didalam Peraturan Bupati ini juga mencakup tentang penyaluran bibit kelapa sawit yang dilaksanakan dengan tiga pola penyaluran. Adapun ketiga pola tersebut yaitu pola gratis, subsidi dan komersil. Untuk pola gratis, penyaluran bibit hanya diberikan kepada Kelompok Tani yang telah terdaftar dan memenuhi persyaratan. Pola gratis dalam penyaluran bibit bertujuan untuk meningkatkan akses petani terhadap sumber daya yang diperlukan untuk pertanian. Penyaluran bibit secara gratis membantu mengurangi beban biaya yang harus ditanggung oleh petani, terutama di daerah yang mungkin memiliki keterbatasan sumber daya. Kelompok tani yang berhak menerima bibit ini harus mendaftar secara resmi.

Pola penyaluran yang kedua yaitu pola subsidi yang ditujukan kepada Pekebun atau Koperasi Unit Desa (KUD). Pola Subsidi dalam penyaluran bibit bertujuan untuk mendukung pekebun atau Koperasi Unit Desa (KUD) dalam memperoleh bibit dengan harga yang lebih terjangkau. Dalam sistem ini, pemerintah memberikan subsidi yang mengurangi biaya yang harus dibayar oleh penerima. Harga yang ditetapkan untuk bibit dalam pola subsidi ini adalah Rp 30.000 per bibit. Pola penyaluran yang ketiga yaitu pola komersil ditujukan juga kepada Pekebun atau Koperasi Unit Desa (KUD). Dalam pola ini, pemerintah memberikan harga sebesar Rp 40.000/bibit. Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong pekebun dan KUD agar lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan bibit. Pekebun dan KUD diharapkan dapat berinvestasi pada bibit yang berkualitas, sehingga dapat meningkatkan produktivitas pertanian mereka. Selain itu, pola ini mendorong pengembangan praktik bisnis yang lebih efisien dan berdaya saing. Dengan beroperasi dalam mekanisme pasar, pekebun dan KUD dapat lebih baik dalam beradaptasi dengan kondisi pasar dan permintaan, sehingga meningkatkan daya saing produk perkebunan mereka. Dalam rangka penyaluran bibit kelapa sawit, Disbunnak Pelalawan memberikan tanggung jawab kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembibitan. Adapun mekanisme penyaluran bibit kelapa sawit yang dilakukan untuk ketiga pola penyaluran diatas adalah sebagai berikut:

1. Kelompok tani mengajukan proposal permohonan dan menyerahkan kepada Tim pelaksana penyaluran bibit kelapa sawit dengan melampirkan KTP, KK, Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah dan Surat Pernyataan Permohonan Bibit Kelapa Sawit.
2. Tim pelaksana mengumpulkan berkas permohonan calon penerima bibit kelapa sawit dan melakukan seleksi untuk menentukan nama calon yang layak atau yang perlu dibantu.
3. Hasil seleksi dituangkan dalam Berita Acara kemudian diusulkan ke Dinas Perkebunan dan Peternakan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyaluran bibit kelapa sawit berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Transparansi dalam proses seleksi dan penyaluran bibit penting untuk menghindari penyimpangan serta memastikan bahwa bantuan diberikan kepada kelompok tani yang benar-benar memenuhi syarat. Selain itu, mekanisme ini dirancang agar tepat sasaran, sehingga bibit yang disalurkan benar-benar diterima oleh petani yang membutuhkan dan memiliki lahan yang sesuai untuk pengembangan tanaman kelapa sawit. Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) telah menyalurkan bibit kelapa sawit dengan pola subsidi sebanyak 87.900 bibit kelapa sawit. Berdasarkan jumlah pengadaan bibit kelapa sawit yaitu sebanyak 255.300 bibit

kelapa sawit, jumlah penyaluran bibit kelapa sawit yang telah dilakukan sangat jauh berbeda dari jumlah pengadaan bibit kelapa sawit. Ini menandakan bahwa antara input dan output tidak seimbang yang berarti produktivitas dari program ini belum tercapai. Selain itu, ditemukan juga bahwa yang menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan pola gratis dan komersil belum berjalan adalah kendala dalam tahap seleksi administrasi dan kelayakan lahan. Setelah Kelompok Tani atau Pekebun mengajukan proposal permohonan bibit kelapa sawit, banyak di antara mereka yang gagal dalam tahap seleksi berkas akibat kelengkapan dokumen yang tidak memenuhi syarat, seperti KTP, KK, Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah, atau Surat Pernyataan Permohonan Bibit Kelapa Sawit. Selain itu, beberapa kelompok tani mengalami kendala dalam verifikasi lokasi lahan, seperti status lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan program, berada di kawasan hutan lindung, atau memiliki konflik kepemilikan. Selain itu, masyarakat juga menilai tidak ada informasi atau bimbingan mengenai prosedur ataupun persyaratan yang harus dipenuhi.

Rendahnya daya beli dan kepercayaan masyarakat terhadap bibit yang ada di Disbunnak Pelalawan menjadi masalah signifikan dalam pelaksanaan penyaluran bibit kelapa sawit. Hal ini tidak hanya berdampak pada jumlah permohonan bibit, tetapi juga memengaruhi keberhasilan program secara keseluruhan. Salah satu faktor utama yang berkontribusi adalah persaingan dengan bibit dari sumber lain. Banyak pekebun yang lebih memilih bibit dari pemasok yang mereka anggap lebih terpercaya, meskipun kualitas bibit tersebut belum tentu terjamin. Keputusan ini sering kali didasari pada pengalaman sebelumnya yang positif atau rekomendasi dari sesama petani, yang menunjukkan pentingnya reputasi di kalangan masyarakat. Selain itu, jarak antara lokasi rumah petani dan tempat pembibitan juga berperan dalam rendahnya daya beli masyarakat. Banyak pekebun yang harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan bibit dari Disbunnak, yang tidak hanya memakan waktu tetapi juga biaya transportasi yang mungkin tidak terjangkau. Hal ini menyebabkan mereka lebih memilih untuk membeli bibit di lokasi yang lebih dekat, meskipun mungkin tidak memiliki kualitas yang sama. Ketidakpuasan yang muncul di kalangan masyarakat bukan hanya sekadar cerminan perasaan negatif terhadap pelayanan yang diterima, tetapi juga menunjukkan betapa pentingnya kinerja organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, terutama dalam sektor-sektor strategis seperti perkebunan. Di Kabupaten Pelalawan, sektor perkebunan memegang peran vital dalam perekonomian daerah. Dengan luas perkebunan yang mencapai 188.195 hektar, tantangan besar dalam pengelolaan sektor ini mengharuskan adanya kinerja organisasi yang efisien, terstruktur, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Luasnya lahan perkebunan di Pelalawan menandakan besarnya potensi ekonomi yang dapat digerakkan melalui pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan komoditas lainnya. Namun, potensi besar ini juga membawa tanggung jawab yang besar bagi organisasi pemerintah, seperti Dinas Perkebunan dan Peternakan, untuk memastikan bahwa segala program dan kebijakan yang berkaitan dengan sektor perkebunan berjalan dengan baik dan memberikan manfaat optimal kepada masyarakat, khususnya para pekebun. Kinerja organisasi yang efektif dalam mengelola lahan perkebunan yang luas tersebut menjadi faktor kunci dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Jika organisasi mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program-program pengembangan perkebunan dengan baik, dampaknya akan terlihat pada peningkatan produktivitas, penyerapan tenaga kerja, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Sebaliknya, ketidakpuasan masyarakat bisa muncul jika kinerja organisasi tidak maksimal, seperti dalam penyaluran bibit kelapa sawit, penyuluhan, maupun pengawasan terhadap praktik perkebunan yang berkelanjutan. Kinerja organisasi tidak hanya sekadar pencapaian administratif, tetapi juga menjadi tolok ukur yang sangat penting dalam menilai efektivitas dan efisiensi suatu organisasi, terutama dalam hal

memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat yang dilayaninya. Ketika sebuah organisasi memiliki kinerja yang baik, dampaknya akan terlihat jelas pada tingkat kepuasan masyarakat. Kinerja yang optimal mampu menciptakan kepercayaan publik, memperkuat legitimasi organisasi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program yang dijalankan.

Sebaliknya, jika kinerja organisasi tidak mencapai standar yang diharapkan, hal ini dapat memicu ketidakpuasan, kekecewaan, dan bahkan protes dari masyarakat. Ketidakpuasan ini sering kali menjadi indikator bahwa ada aspek-aspek tertentu dalam manajemen, pelaksanaan program, atau layanan publik yang tidak berjalan dengan semestinya. Oleh karena itu, kinerja organisasi menjadi instrumen vital dalam proses evaluasi, baik secara internal maupun eksternal, guna memastikan bahwa organisasi tersebut mampu memenuhi tujuannya secara efektif. Selain itu, kinerja organisasi yang baik juga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Ketika program-program yang dijalankan dapat terlaksana sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan, masyarakat akan merasa puas karena kebutuhan mereka terpenuhi dengan baik. Kepuasan masyarakat terhadap layanan atau program yang diberikan juga dapat menjadi umpan balik positif bagi organisasi, memotivasi para pegawai dan manajemen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja mereka. Dalam konteks pemerintahan, kinerja organisasi menjadi sangat krusial karena berhubungan langsung dengan pelayanan publik yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan untuk memastikan bahwa organisasi terus berupaya memperbaiki kualitas pelayanannya. Faktor-faktor seperti transparansi, akuntabilitas, inovasi dalam pelayanan, dan responsivitas terhadap keluhan masyarakat menjadi elemen penting dalam mengukur kinerja organisasi. Semakin baik organisasi dalam mengelola faktor-faktor tersebut, semakin tinggi pula tingkat kepuasan masyarakat yang bisa dicapai, sehingga tujuan besar organisasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dapat terealisasi dengan lebih baik.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di lapangan, ditemukan permasalahan menyangkut masih rendahnya kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam Program Penyaluran Bibit Kelapa Sawit di Kabupaten Pelalawan. Hal ini terlihat dari indikator-indikator sebagai berikut: Realisasi penyaluran bibit kelapa sawit unggul dan bersertifikat belum tercapai. Penyaluran bibit kelapa sawit yang hanya terlaksana pada pola subsidi, sedangkan pola gratis dan komersil belum ada dikarenakan persyaratan yang sulit dipenuhi. Rendahnya daya beli masyarakat terhadap bibit kelapa sawit yang ada di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah diuraikan diatas. Peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana penyaluran bibit kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul penelitian “Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Dalam Penyaluran Bibit Kelapa Sawit di Kabupaten Pelalawan.” Berdasarkan latar belakang maka dapat disimpulkan bahwa identifikasi masalahnya adalah berikut: Bagaimana kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Dalam penyaluran bibit kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan? Apa saja faktor-faktor penghambat kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam penyaluran bibit kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan? Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian sebagai berikut: Untuk menganalisis kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam penyaluran bibit kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam penyaluran bibit kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan.

Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Penulis, Judul dan Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Putri dan Febuati, Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Medan, 2023	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan dapat dikatakan efektif karena tujuan pembinaan tercapai namun, belum efisien dalam aspek dana. Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan dari indikator kualitas dapat dikatakan baik dilihat dari aspek transparansi, kondisional, partisipatif, serta keseimbangan hak dan kewajiban. Namun, masih kurang dari aspek akuntabilitas dan kesamaan hak. Kinerjanya dapat dikatakan memiliki ketepatan waktu serta produktivitas yang baik.	Penelitian ini berfokus kepada kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam penyaluran bibit kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan.
2.	Dara Rizkita dan Harapan Tua RFS, Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Agam dalam Penanggulangan Pengangguran di Kabupaten Agam, 2022	Kualitatif	Hasil penelitian yaitu dalam pelaksanaan kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Agam dalam penanggulangan pengangguran di Kabupaten Agam masih terdapat hambatan dalam pelayanannya seperti kurangnya penyerapan tenaga kerja, kurangnya keahlian sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana yang belum memadai dan pelatihan ketenagakerjaan yang belum maksimal.	Penelitian ini berfokus kepada kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam penyaluran bibit kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan.
3.	Ni Putu Anik Prabawati, Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gianyar dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, 2020	Kualitatif	Hasil penelitian menyatakan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa telah melaksanakan kinerja sesuai dengan ketentuan indikator pengukuran kinerja dalam memberdayakan masyarakat.	Penelitian ini berfokus kepada kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam penyaluran bibit kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan.
4.	Arun Ambasari, Danik Nurjanah dan Muhammad Fathul Anwar, Kinerja Petani Swadaya Kelapa Sawit di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, 2022	Kualitatif	Hasil penelitian ini yaitu secara kualitas, petani belum menerapkan prinsip-prinsip praktik budidaya yang baik. Petani dalam melakukan budidaya kelapa sawit masih sebatas otodidak atau belajar dengan petani swadaya satu dengan yang lainnya. Secara kuantitas petani swadaya belum mencapai kinerja yang baik. Kendala yang dihadapi oleh petani swadaya kelapa sawit di Desa Makmur yaitu masalah kualitas bibit dan varietas yang tidak teridentifikasi. Sehingga sangat mempengaruhi hasil produksi kelapa sawit.	Penelitian ini berfokus kepada kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam penyaluran bibit kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan.
5.	Cut Irama Phonna, Wais Alqarni dan Afrijal, Analisis Kinerja Dinas Pertanian dan	Kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh terhadap peningkatan kualitas beras lokal belum dapat berjalan dengan maksimal dikarenakan ada beberapa hambatan dalam	Penelitian ini berfokus kepada kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan

	Perkebunan Aceh Terhadap Peningkatan Kualitas Beras Lokal		pelaksanaan. Hal ini dapat dilihat dari indikator masukan dimana segala sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan sudah mencukupi, indikator proses dimana segala tahapan kegiatan sudah dilakukan dengan baik, indikator keluaran dimana sudah banyak capain-capaian yang di dapatkan, dan indikator hasil dimana dinas memiliki harapan atau hasil yang harus dicapai untuk kedepannya.	dalam penyaluran bibit kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan.
--	---	--	---	---

Sumber: Olahan Penulis, 2024

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki fokus serupa, yaitu analisis kinerja dinas dalam melaksanakan jabatannya. Namun perbedaannya terletak pada lokasi dan konteks spesifik yang diteliti. Penelitian ini menyoroti kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan dalam menyalurkan bibit kelapa sawit unggul kepada masyara. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mendalam tentang pelaksanaan tugas dinas, termasuk tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki dan memahami perilaku individu atau kelompok atau fenomena sosial dalam kondisi alam, dan menggunakan deskriptif verbal dan/atau tertulis (bukan kuantitatif) untuk mendapatkan data dan menafsirkannya juga secara deskriptif. Atau secara sederhana penelitian kualitatif adalah metode mengungkap gejala secara holistik dan kontekstual dengan mengumpulkan data dari lingkungan alam, dengan menggunakan peneliti sendiri sebagai alat utama (Hadisaputra, 2021). Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang menghasilkan data yang rinci dari suatu fenomena yang diteliti dengan bertujuan untuk mengumpulkan data dan mendapatkan informasi serta dokumentasi terkait dengan Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam Penyaluran Bibit Kelapa Sawit di Kabupaten Pelalawan. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan yang terletak di Jalan Komplek Perkantoran Bhakti, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Pemilihan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan sebagai lokasi penelitian serta fokus pada program penyaluran bantuan bibit kelapa sawit merupakan pilihan yang tepat, strategis, dan relevan untuk menghasilkan temuan yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan sektor perkebunan di daerah tersebut. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Pada hakikatnya pengertian keduanya sama-sama merupakan sumber data, namun berbeda cara memperolehnya. Berikut definisi dari kedua sumber data tersebut, yaitu:

1. Data Primer didefinisikan sebagai kumpulan informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari lokasi penelitian (Martono, 2016). Data tersebut langsung diperoleh dari informan penelitian dan pengamatan secara langsung ke lapangan terkait dengan kegiatan penyaluran bibit kelapa sawit yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan.
2. Data Sekunder didefinisikan sebagai data yang telah diperoleh dari orang kedua atau telah dikumpulkan peneliti dari berbagai laporan-laporan atau dokumen-dokumen atau buku-buku, literatur dan bacaan terkait dengan penyaluran bibit kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan. Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini antara lain: Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penyaluran Bibit Kelapa Sawit, Data Penjualan Bibit Kelapa

Sawit Tahun 2022 – 2024, Jumlah Kelompok Tani di Kabupaten Pelalawan serta Standar Operasional Prosedur (SOP) penyaluran bibit kelapa sawit.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahap yang sangat penting dalam penelitian, karena kualitas data yang diperoleh sangat bergantung pada teknik pengumpulan yang digunakan. Teknik pengumpulan data yang tepat dan sistematis akan menghasilkan data dengan kredibilitas yang tinggi dan akurat, sedangkan teknik yang tidak sesuai atau kurang efektif dapat mengurangi kualitas data dan mengarah pada hasil yang kurang dapat diandalkan (Robby Yana et al., 2024). Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

1. Observasi: Dalam penelitian ini, penulis turun langsung ke lapangan dalam melihat kegiatan pembibitan kelapa sawit hingga penyaluran bibit kelapa sawit oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan.
2. Wawancara: Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara semi terstruktur yang sebelumnya telah disusun dengan cermat. Penulis melakukan wawancara dengan informan dimulai dari bulan Oktober 2024. Hasil wawancara diperoleh dan dipahami secara mendalam dengan didukung oleh data dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan.
3. Studi Pustaka: Dalam penelitian ini bersumber dari hasil bacaan dari buku-buku atau data serta ditambah dengan penelusuran data secara online dengan menggunakan fasilitas internet terkait Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam penyaluran bibit kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan.
4. Dokumentasi: Dalam penelitian ini yaitu Peraturan Bupati, file dan foto yang didapatkan pada saat penulis melakukan observasi langsung ke lapangan serta pada saat penelitian ini berlangsung.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyaluran Bibit Kelapa Sawit Oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan

Kinerja organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sebuah organisasi dalam melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin sesuai dengan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kinerja organisasi tidak hanya berfokus pada pencapaian tujuan saja, tetapi juga pada proses, kondisi internal dan eksternal organisasi serta sumber daya manusia atau pihak-pihak yang terlibat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam penyaluran bibit kelapa sawit masih belum mencapai tingkat yang optimal. Beberapa kendala dan kekurangan teridentifikasi, baik dalam hal produktivitas kerja, kemampuan menanggapi kebutuhan masyarakat, tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas, maupun transparansi dan akuntabilitas dalam program pengelolaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan di berbagai aspek agar kinerja dinas ini dapat ditingkatkan. Pembahasan lebih mendalam mengenai temuan dan rekomendasi perbaikan akan disampaikan berdasarkan keempat indikator kinerja yang telah disebutkan, untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan.

Produktivitas

Produktivitas dapat diartikan sebagai perbandingan antara *input* dan *output* yang dihasilkan oleh suatu organisasi. Rasio ini memberikan gambaran yang jelas tentang sejauh mana suatu organisasi mampu mencapai tingkat produktivitas yang optimal sesuai dengan

tujuan yang telah ditetapkan. *Input* dalam hal ini mencakup berbagai sumber daya, seperti tenaga kerja, waktu, modal, dan material, sementara *output* merujuk pada hasil kerja atau produk yang dihasilkan oleh organisasi. Semakin efisien organisasi dalam mengelola input untuk menghasilkan output yang maksimal, semakin tinggi tingkat produktivitas yang dicapai. Produktivitas juga menjadi indikator penting untuk menilai keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya. Tidak hanya menunjukkan efektivitas dalam pencapaian hasil, produktivitas juga mencerminkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang tersedia. Organisasi yang produktif adalah organisasi yang mampu mengoptimalkan berbagai elemen kerja, seperti manajemen waktu, alokasi sumber daya, dan kualitas tambah proses kerja, untuk menghasilkan nilai yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan. Dengan demikian, peningkatan produktivitas bukan hanya soal mengukur rasio input dan output, tetapi juga tentang bagaimana organisasi terus beradaptasi, berinovasi, dan meningkatkan kualitas kinerjanya secara berkesinambungan. Berkenaan dengan hal tersebut, rasio antara input dan output dalam penelitian ini mengacu pada seberapa besar efektivitas *input* yang dimiliki oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan dalam menghasilkan *output* yang maksimal. *Input* tersebut terdiri dari sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana yang mendukung tugas penyaluran bibit kelapa sawit. *Output* yang diharapkan adalah tingkat keberhasilan penyaluran bibit kelapa sawit yang dapat dilaksanakan dengan optimal sesuai dengan harapan. Berdasarkan hasil wawancara mengenai produktivitas dari kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan, dapat disimpulkan bahwa produktivitas kinerja dalam penyaluran bibit kelapa sawit sudah terlaksana dengan namun masih belum optimal karena masih adanya kendala dalam pemeliharaan bibit kelapa sawit.

Responsivitas

Responsivitas mengacu pada kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas layanan, serta mengembangkan program-program pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Inti dari responsivitas adalah sejauh mana birokrasi mampu menyesuaikan layanannya dengan kebutuhan riil masyarakat, dan bukan hanya melaksanakan program berdasarkan perspektif internal birokrasi semata. Pemerintah dikatakan responsif apabila kebutuhan masyarakat dapat diidentifikasi oleh para pembuat kebijakan dengan pengetahuan yang tepat dan menjawab kebutuhan masyarakatnya. Responsivitas dalam penelitian ini dapat dilihat dari kemampuan pegawai dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat Kabupaten Pelalawan. Pegawai di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan memiliki komitmen yang tinggi dalam menanggapi permintaan masyarakat terkait bibit kelapa sawit. Mereka memastikan setiap permohonan yang diproses sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Proses ini meliputi verifikasi dokumen seperti pengajuan proposal, pengecekan ke lapangan, dan pemeriksaan status lahan melalui aplikasi peta untuk memastikan lahan yang diserahkan bukan bagian dari Hak Guna Usaha (HGU). Jika lahan termasuk dalam area HGU, maka secara otomatis pengajuan tidak dapat diproses lebih lanjut.

Dengan mendengarkan suara masyarakat dan mengatasi kendala yang mereka hadapi, Disbunnak dapat meningkatkan efisiensi program penyaluran bibit kelapa sawit. Upaya untuk menerapkan prosedur dan meningkatkan transparansi dapat berkontribusi pada peningkatan partisipasi petani, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada produktivitas pertanian kelapa sawit di daerah tersebut. Kendala bantuan ini menimbulkan tantangan bagi masyarakat yang mengharapkan hal tersebut sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian mereka. Untuk mengatasi masalah ini, Dinas Perkebunan dan Peternakan berupaya mempelajari kembali regulasi yang ada terkait penyaluran bibit kelapa sawit. Upaya ini mencerminkan kesadaran Dinas bahwa regulasi yang ada perlu disesuaikan dengan kebutuhan

masyarakat saat ini. Dengan langkah ini, diharapkan proses penyaluran dapat diperbaiki dan masyarakat dapat merasakan manfaat yang lebih optimal dari program-program yang ada. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi dan perbaikan regulasi juga penting, agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar relevan. Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa responsivitas Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan masih terdapat kendala dalam menangani keluhan masyarakat terkait dengan persyaratan penyaluran bibit kelapa sawit secara gratis. Namun, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan berupaya untuk mengatasi hal ini dengan mempelajari kembali regulasi yang ada terkait dengan penyaluran bibit kelapa sawit ini.

Responsibilitas

Responsibilitas mengacu pada sejauh mana kegiatan organisasi publik dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar, serta sejalan dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun yang implisit. Dalam konteks ini, tanggung jawab bukan sekedar kewajiban untuk menjalankan tugas, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan etika dalam pelayanan publik. Dengan kata lain, tanggung jawab menunjukkan apakah suatu organisasi publik menjalankan kepatuhan terhadap prosedur dan aturan yang seharusnya, serta menyelaraskan dengan visi, misi, dan arahan strategi dari organisasi tersebut. Aspek ini penting karena menunjukkan sejauh mana organisasi mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam setiap aktivitasnya. Dalam menjalankan tanggung jawab ini, organisasi publik diharapkan dapat menciptakan transparansi dan akuntabilitas, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut. Ketika sebuah organisasi dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan yang diambil, maka akan tercipta lingkungan yang lebih baik bagi partisipasi masyarakat. Lebih jauh lagi, tanggung jawab juga mencakup evaluasi berkala terhadap kinerja organisasi. Proses ini meliputi pengukuran hasil dari program dan kebijakan yang diterapkan, serta umpan balik dari masyarakat untuk mengetahui apakah kebutuhan dan harapan mereka terpenuhi. Dengan demikian, tanggung jawab bukan hanya tentang mengikuti aturan, tetapi juga beradaptasi dan berinovasi dalam menghadapi tantangan yang ada. Organisasi masyarakat yang responsif akan lebih mudah beradaptasi dengan perubahan dan tuntutan masyarakat, serta mampu memberikan layanan yang lebih baik dan relevan sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini menciptakan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, di mana kedua belah pihak bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama demi kesejahteraan dan kemajuan. Proses penyaluran bibit kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan dilakukan dengan sistem administrasi yang ketat. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, termasuk verifikasi KTP dan status lahan, menjadi syarat utama sebelum bibit diberikan. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk memastikan bahwa bibit hanya diterima oleh pihak yang memenuhi kriteria dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan tunduk pada peraturan yang telah ditetapkan. Dari pembahasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa responsibilitas Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan masih belum optimal dikarenakan. Hal ini terlihat proses pengambilan bibit yang terhambat oleh kondisi kualitas bibit yang tidak sesuai standar dalam blok yang ditentukan menunjukkan bahwa ada celah dalam implementasi SOP. Ketidakpuasan petani terhadap kualitas bibit dapat mengurangi kepercayaan mereka terhadap program, yang pada gilirannya berdampak pada partisipasi mereka dalam pengambilan bibit.

Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menunjukkan sejauh mana kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk atau bertanggung jawab kepada pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Akuntabilitas

merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang amanah (*agent*) kepada pihak yang memberikan amanah (*principal*). Akuntabilitas yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas dapat disimpulkan sebagai kewajiban seseorang atau organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang telah diberikan. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan memiliki tanggung jawab dalam hal perkebunan dan peternakan. Dalam program penyaluran bibit kelapa sawit, Dinas Perkebunan dan Peternakan memiliki tanggung jawab untuk memberikan bibit kelapa sawit yang unggul kepada masyarakat melalui penanganan bibit kelapa sawit yang profesional. Proses evaluasi ini sangat penting dalam konteks akuntabilitas, karena memungkinkan Dinas Perkebunan dan Peternakan untuk menilai sejauh mana mereka memenuhi tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan pemerintah. Dengan pendekatan yang terstruktur, Dinas dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, serta meningkatkan kinerja dalam melaksanakan program-programnya. Selain itu, audit eksternal yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahun menambah lapisan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Audit ini memastikan bahwa semua pengeluaran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Pelalawan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Melalui audit eksternal, Dinas Perkebunan dan Peternakan tidak hanya mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran, tetapi juga mendapatkan masukan yang dapat meningkatkan sistem pengelolaan keuangan di masa depan.

Dengan adanya audit eksternal, Dinas Perkebunan dan Peternakan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran dan penggunaan sumber daya yang ada. Akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan keuangan ini sangat penting untuk membangun hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program-program yang dijalankan. Secara keseluruhan, komitmen terhadap praktik-praktik terbaik dalam monitoring dan evaluasi, serta adanya audit yang transparan, akan memperkuat akuntabilitas Dinas Perkebunan dan Peternakan. Dengan demikian diharapkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Kabupaten Pelalawan. Dari pembahasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa akuntabilitas dari Disbunnak Pelalawan sudah baik. Tingkat kepatuhan terhadap SOP, serta adanya evaluasi dan audit yang rutin, menunjukkan bahwa Dinas ini berkomitmen untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik.

Faktor-Faktor yang Menghambat Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan

Dalam pencapaian tujuan pada suatu organisasi pasti ada yang menjadi penghambat kinerja. Faktor penghambat tersebut bisa saja berasal dari dalam maupun luar organisasi. Peneliti akan membahas faktor-faktor yang menghambat kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan dalam penyaluran bibit kelapa sawit. Adapun faktor-faktor penghambat tersebut yaitu sebagai berikut:

Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) berperan penting dalam keberhasilan suatu organisasi. Ketika pengelolaan SDM dilakukan secara efektif, organisasi dapat memaksimalkan potensi karyawan dan meningkatkan hasil kerja secara keseluruhan. Sumber daya manusia yang bersemangat dan termotivasi tidak hanya mampu menjalankan tugas mereka dengan baik, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan strategis organisasi. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang positif, di mana inovasi dan kolaborasi

dapat berkembang. Sebaliknya, jika pengelolaan SDM kurang diperhatikan, dampaknya bisa sangat merugikan. Kinerja yang rendah, konflik internal, dan penurunan produktivitas adalah beberapa konsekuensi yang mungkin muncul akibat manajemen SDM yang buruk. Ketidakpuasan karyawan dapat menyebabkan tingginya tingkat turnover dan menurunnya semangat kerja. Oleh karena itu, investasi dalam pengelolaan sumber daya manusia yang baik sangat penting untuk menciptakan organisasi yang sukses dan berkelanjutan. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Disbunnak Pelalawan dalam penyaluran bibit kelapa sawit sudah memadai. Meskipun sumber daya manusia sudah memadai, akan tetapi keberhasilan dari penyaluran bibit kelapa sawit unggul ini juga terletak pada kemampuan sumber daya manusia yang ada terutama dalam hal penyaluran. Selain itu, pengawasan yang efektif dari tenaga ahli atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) sangat penting untuk meningkatkan pemahaman tentang standar yang diharapkan. Pengawasan yang konstruktif dapat memberikan bimbingan dan dukungan yang diperlukan, sehingga para pekerja dapat lebih memahami ekspektasi yang ada. Dengan adanya arahan yang jelas dan umpan balik yang berkelanjutan, kualitas hasil kerja mereka diharapkan akan meningkat. Pengawasan yang baik juga menciptakan komunikasi dua arah, di mana karyawan merasa didengar dan dihargai, sehingga mendorong mereka untuk berkontribusi lebih aktif dan meningkatkan kinerja keseluruhan tim.

Kondisi Bibit Kelapa Sawit

Faktor penghambat penyaluran bibit kelapa sawit dapat dipahami melalui berbagai aspek yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi proses pendistribusian. Salah satu faktor utama adalah kondisi bibit itu sendiri. Bibit kelapa sawit yang tidak berkualitas, baik dari segi kesehatan maupun varietas, dapat menjadi kendala serius dalam penyaluran. Jika bibit terinfeksi hama atau penyakit, tidak hanya mengurangi tingkat keberhasilan penanaman, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian finansial bagi petani. Kerugian ini mengancam keberlangsungan program penyaluran dan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap inisiatif pemerintah. Kondisi bibit yang kurang baik di lokasi pembibitan menjadi salah satu penyebab utama dari masalah ini. Bibit yang tidak dirawat dengan baik atau tidak memenuhi standar kesehatan dapat meningkatkan hasil panen dan menyulitkan petani dalam mengelola kebun mereka. Selain itu bibit yang berkualitas rendah juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tanaman di masa depan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa proses pemilihan dan pengadaan bibit dilakukan dengan cermat, serta melibatkan evaluasi yang ketat terhadap kualitas bibit sebelum disampaikan kepada petani.

Kondisi bibit di Disbunnak Pelalawan memang harus diperhatikan dengan serius supaya penyaluran bibit kelapa sawit dapat terlaksana dengan baik dan memberikan kepuasan bagi pekebun atau masyarakat. Kualitas bibit yang optimal adalah faktor kunci dalam keberhasilan budidaya kelapa sawit. Bibit yang sehat dan berkualitas tinggi tidak hanya meningkatkan peluang pertumbuhan yang baik, tetapi juga berkontribusi pada hasil panen yang lebih tinggi. Jika bibit yang disuplai tidak memenuhi standar kualitas, maka hal ini dapat menyebabkan berbagai masalah, mulai dari pertumbuhan yang terhambat hingga risiko gagal panen. Untuk memastikan penyaluran bibit yang efektif, perlu ada sistem pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap kondisi bibit. Dinas Perkebunan dan Peternakan harus melakukan inspeksi rutin untuk memastikan bahwa bibit yang disediakan dalam kondisi baik, serta memberikan pelatihan kepada staf mengenai standar kualitas yang harus dipenuhi. Faktor penghambat dari segi lingkungan dalam penyaluran bantuan bibit kelapa sawit sangat mempengaruhi keberhasilan program ini. Salah satu faktor utama adalah kondisi cuaca, terutama kemarau panjang. Ketika kemarau terjadi, bibit kelapa sawit tidak mendapatkan cukup air, yang menyebabkan stres pada tanaman. Jika kondisi ini berlangsung lama, bibit dapat mengalami kekeringan bahkan mati. Hal ini mengakibatkan berkurangnya jumlah bibit

yang berhasil disalurkan dan berdampak negatif pada produktivitas kebun kelapa sawit di masa depan.

Verifikasi Lahan

Faktor penghambat penyaluran bibit kelapa sawit dapat diidentifikasi dari berbagai aspek yang mempengaruhi proses pendistribusian. Salah satu faktor utama adalah kondisi bibit itu sendiri, dimana bibit yang tidak berkualitas atau terinfeksi hama dapat mengurangi tingkat keberhasilan penanaman. Selain itu, kendala logistik, seperti infrastruktur transportasi yang buruk, juga dapat menghambat pengiriman bibit ke daerah-daerah terpencil. Tantangan yang dihadapi dalam proses verifikasi lahan sebelum penyaluran bibit kelapa sawit. Ketidakcocokan antara data yang tersedia dan kondisi lahan di lapangan merupakan isu utama yang memperlambat proses penyaluran. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan sistem pendataan untuk memastikan keakuratan informasi mengenai lahan yang akan digunakan untuk penanaman. Lebih lanjut, verifikasi lahan yang memerlukan pengecekan langsung di lapangan mengindikasikan kebutuhan untuk meningkatkan kolaborasi antara Dinas Perkebunan dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam melaporkan kondisi lahan mereka sangatlah penting, karena dapat mempercepat proses verifikasi dan meminimalkan kesalahan data yang ada. Bapak Akhtar juga menyoroti pentingnya peningkatan sosialisasi mengenai prosedur penyaluran bibit. Dengan memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami, diharapkan masyarakat dapat mempersiapkan lahan mereka dengan baik serta memahami langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapatkan bibit. Selain itu, Dinas Perkebunan berencana memanfaatkan teknologi dalam pengumpulan data dan verifikasi lahan, seperti penggunaan aplikasi untuk memetakan lahan yang terdaftar. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses penyaluran bibit kelapa sawit, sehingga memberikan dampak yang lebih signifikan bagi produktivitas pertanian di masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait yang telah dijelaskan tentang kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam penyaluran bibit kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan masih jauh dari optimal. Hal ini terlihat dari empat indikator penilaian kinerja yang telah dibahas sebelumnya, di mana tiga di antaranya belum mencapai hasil yang diharapkan. Pertama, indikator produktivitas dinas ini terhambat dikarenakan sumber daya manusia, jumlah bibit yang tersalurkan dan anggaran operasional yang tidak memadai. Kedua, indikator responsivitas juga belum optimal karena masih adanya keluhan masyarakat yang belum teratasi mengenai persyaratan perolehan bibit kelapa sawit secara gratis maupun komersil. Ketiga indikator responsibilitas belum optimal dikarenakan masih ada penyimpangan dari Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditentukan.
2. Terdapat beberapa faktor yang menghambat Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam proses penyaluran bibit kelapa sawit. Pertama, pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang belum memadai menjadi salah satu kendala utama. Kurangnya pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi staf dapat mengurangi efektivitas dalam melaksanakan tugas mereka. Selain itu, kondisi bibit kelapa sawit yang tidak optimal juga menjadi masalah, dimana bibit yang kurang sehat atau berkualitas tidak dapat memberikan hasil yang baik bagi para petani. Ditambah lagi, proses verifikasi lahan yang kurang efisien sering kali menghambat kelancaran penyaluran. Faktor ketiga penghambat ini secara keseluruhan berdampak negatif pada kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan di Kabupaten Pelalawan, sehingga sulit mencapai tujuan yang diharapkan.

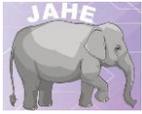
Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti terkait Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Dalam Penyaluran Bibit Kelapa Sawit di Kabupaten Pelalawan, peneliti mencoba memberikan saran serta harapan yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk menangani permasalahan penyaluran bibit kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan sebagai berikut:

1. Kepada Bupati Pelalawan, peneliti menyarankan untuk melakukan evaluasi kembali terhadap kebijakan penyaluran bibit kelapa sawit, khususnya mengenai pola penyaluran secara gratis. Hingga saat ini, masih belum ada masyarakat yang menerima bibit kelapa sawit dengan pola tersebut, yang disebabkan oleh kesulitan dalam memenuhi persyaratan yang ada. Diharapkan Bupati Pelalawan dapat mempertimbangkan untuk menyederhanakan proses ini agar lebih banyak masyarakat dapat memanfaatkan program tersebut dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
2. Kepada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan untuk melakukan advokasi untuk meningkatkan anggaran yang dialokasikan dari APBD. Anggaran yang dimaksud untuk peningkatan keperluan pemeliharaan bibit seperti pupuk dan herbisida serta peningkatan anggaran untuk pengawasan sehingga dapat dilaksanakan peninjauan setelah bibit disalurkan untuk memastikan bibit yang disalurkan benar-benar ditanam oleh masyarakat.
3. Kepada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan untuk mengembangkan program pelatihan bagi petani tentang teknik pemeliharaan bibit yang efisien dapat membantu mengurangi kerugian akibat kekurangan air dan hama. Edukasi mengenai penggunaan teknologi irigasi sederhana juga penting.
4. Kepada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan untuk melakukan survei terhadap lokasi pembibitan untuk memilih area yang lebih aman dari ancaman binatang liar. Pemasangan pagar atau penggunaan metode pengusir hewan dapat membantu melindungi bibit dari serangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamanda, D. R., & Rfs, H. T. (2022). Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Agam dalam Penanggulangan Pengangguran di Kabupaten Agam.
- Amalia, R., & Sakti, S. K. (2020). Kinerja Dinas Pangan Pertanian Dan Perikanan Dalam Pemberdayaan Petani Rumput Laut Di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)*, 8(2), 85-102.
- Ariska Sari, T., Purnamasari, H., Aditya, I., & Singaperbangsa Karawang, U. (2023). Efektivitas Kinerja Organisasi Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang.
- Budijaya, M. I., Yppt, S., & Tasikmalaya, P. (2022). *KINERJA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK. Indonesian Journal Of Education And Humanity*, 2.
- Furqan Oktowita Putra, M., & Fachri Adnan, M. (2022). Kinerja Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Pariwisata Di Kota Padang Pasca Covid-19. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 6(3), 2598-9944. <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i3.3388/http>
- Hadisaputra, P. (2021). Penelitian Kualitatif.
- Hanafi, I., Fatah Hidayat, A., Siti, A., Program, F., Stia, P., & Priatim Tasikmalaya, Y. (2023). Pengaruh Pengawasan Dan Pemasangan Terhadap Kinerja Pegawai Di Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya. *Indonesian Journal Of Education And Humanity*, 3.
- Hartati, A. (2022). Pengukuran Kinerja Sektor Publik (Manafe, Ed.). CV. Media Sains Indonesia.
- Hartati, dkk. (2020). *Buku Digital-Pengukuran Kinerja Sektor Publik*.
- Hudaya, P. W., Herlinda, & Masnon. (2023). Kinerja Pegawai Dalam Pembinaan Narapidana Pada Rumah Tahanan Negara Kelas Iib Sungai Penuh. Jan Maha.



- Karso, J. A. (2022). Good Governance.
- Khairudin, Soewito, Aminah, Haninun, & Nurdiawansyah. (2022). Membangun Kepercayaan Publik di Indonesia: Peran Good Governance dan E-government.
- Mahyuddin, M. (2023). Teori Organisasi.
- Martono, N. (2016). Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci.
- Mawarni, W., & Sularmi, L. (2024). Analisis Proses Rekrutmen Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Pada Pt. Supra Boga Lestari, Tbk. Jakarta Barat. Jorapi: Journal of Research and Publication Innovation, 2(1).
- Millensyah, E. W., Supriyono, B., Rendra, ☐, & Wismanu, E. (2023). Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-prinsip Good Governance terhadap Kinerja Organisasi (Disdukcapil Kabupaten Magetan) (Vol. 9, Issue 2).
- Murdiyanto, E. (2023). Metode Penelitian Kualitatif: (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal).
- Mustiqowati, P. :, Fithriyyah, U., Sampul, P., & Tualeka, C. (2021). Dasar-Dasar Teori Organisasi.
- Nababan, S., Nurdiani Azizah, A., Purnamasari, H., & Singaperbangsa, U. (n.d.). Kinerja dinas kebudayaan dan pariwisata kota bandung dalam collaborative governance. 18(3), 2021–2409.
- Narpati, B., Sudiantini, D., & Pd, S. (2022). Perilaku Organisasi (Teori Dan Konsep).
- Novriyanti, K., & Samad, M. A. (2020). Organizational Performance Of The Regional Disaster Management Agency Office In The City Of Palu.
- Oktaviani, L., Kurhayadi,) ;, Rezky,) ;, & Barokah, A. (2023). Implementasi Good Governance dalam Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Cimahi Tengah. In Jurnal Professional (Vol. 10, Issue 2).
- Praera, R., Abdussamad, Z., & Amala, R. (2021). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci (Vol. 3, Issue 2).
- Robby Yana, P., Ardiansyah Hernadi, N., Rachmawati, F., Putri Hayam Dey, N., Wahyuning Purwanti, E., Noviana Yudho Bawono, R., Septian Riasanti Mola, M., Djumaty, B. L., & Kharisma Putra, G. (2024). Metode Penelitian Kualitatif (Teori, Metode Dan Praktik). www.freepik.com
- Rosadi, I., Saleh, H., & Chahyono. (2022). Good Governance Perspektif Kinerja Keuangan Daerah.
- Rumawas, W., & Sos, S. (2021). Manajemen Kinerja.
- Ruth Silaen, N., Chairunnisah, R., Rizki Sari Elida Mahriani, M., Tanjung, R., Triwardhani, D., Haerany Anis Masyruroh, A., Gede Satriawan, D., Sri Lestari Opan Arifudin, A., Rialmi, Z., & Putra, S. (2021). Kinerja Karyawan. www.penerbitwidina.com
- Sinambela, L. P., & Sinambela, S. (2019). Manajemen Kinerja: Pengelolaan, Pengukuran dan Implikasi Kinerja. Rajawali Pers.
- Supriadi, Y. N., Asmarany, A. I., Rini, A. S., Ekowati, D., & Sunimah. (2023). Konsep Dasar Manajemen Organisasi.
- Suwaji, R. (2020). Analisis Kinerja Organisasi Publik Pada Pdam Kota Mojokerto.
- Tampubolon, M., Simanjuntak, N., Si, M., & Silalahi, F. (2023). Birokrasi & Good Governance. Www.Globaleksekitifteknologi.Co.Id
- Wardhana, A., & Puspita Sari, A. (2023). Manajemen Kinerja (Konsep, Teori, Dan Penerapannya) Ade Onny Siagian Bina Sarana Informatika.
- Zulfia, H., Endrawan, G., Rosika, C., & Frinaldi, A. (2023). Implementasi Kebijakan Inovasi Daerah Dalam Peningkatan Kinerja Organisasi Pada Pemerintah Kota Padang. Jurnal Ilmu Administrasi, 14(2).
- Zulkarnaini. (2019). Teori Organisasi (Zulkarnaini, Ed.). Badan Penerbit Universitas Riau.
-